

SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM TATAKELOLA
PERKOTAAN DI LAPANGAN SYECH YUSUF
KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA**

Disusun dan Diusulkan Oleh

IRFANDI M

Nomor Stambuk : 105641102616



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM TATAKELOLA
PERKOTAAN DI LAPANGAN SYECH YUSUF
KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan



Kepada

31/03/2021

1 cap
Smb. Alumni

P/0035/IPM/2109
IRF
S²

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

PENERIMA TIM


Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0155/FSP/A.3-VIII/II/42/2020 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Selasa 23 Februari 2021.



Ketua





Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si

Penguji

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua)
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd
3. Dr. Hafiz Elfiansyah Parawu, M.Si
4. Dr. Hj. Sudarmi, M.Si


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Irfandi. M

Nomor Stambuk : 105641102661

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa Proposal Penelitian dengan judul Strategi Pemerintah Daerah dalam Tatakelola Perkotaan di Lapangan Syekh Yusuf Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa adalah sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain, tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas Pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

Makassar, 2020

Yang menyatakan



Irfandi. M

ABSTRAK

IRFANDI M, 2021. Strategi Pemerintah Daerah dalam Tatakelola Perkotaan di Lapangan Syekh Yusuf Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. (dibimbing Oleh Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd dan Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pemerintah Daerah dalam Tatakelola Perkotaan di Lapangan Syekh Yusuf Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang berfokus pada Strategi Pemerintah Daerah dalam Tatakelola Perkotaan di Lapangan Syekh Yusuf. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe studi kasus dengan jumlah informan sebanyak 4 orang. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis hasil menggunakan analisis dari indikator Inovasi menurut Fred R. David yaitu memformulasikan strategi, mengimplementasikan strategi dan mengevaluasi strategi. Analisis tersebut menunjukkan bahwa Strategi Pemerintah Daerah dalam Tatakelola Perkotaan di Lapangan Syekh Yusuf yaitu dengan adanya pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Lapangan Syekh Yusuf Pemerintah Daerah membagi beberapa bagian atau Zona. Dimana dalam setiap zona memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pada zona A, merupakan zona yang digunakan ketika Upacara. Zona B untuk Lapangan sepak bola dan arena bermain anak. Zona C sebagai Pujasera (Pusat Jajanan Serba Ada) dan Olahraga yang terdiri dari lapangan volly, lapangan basket, lapangan futsal, lapangan takraw dan lapangan skateboard dan Zona D sebagai tempat Monumen Patonro yang terdiri dari tiga lantai. Bentuk mengimplementasikan Strategi yang dicanangkan oleh Pemerintah yaitu kedepan nantinya membentuk Smartvity. Misalnya dalam perjalanan nantinya RTH kedepan akan membangun cctv disetiap titik. Secara khusus RTH itu merupakan program prioritas Kabupaten Gowa dimana Strategi itu merupakan acuan Visi Misi Kabupaten Gowa untuk kedepan yang lebih bersejahtera dan lebih baik. Pengalokasian sumber daya yang dimiliki sehingga strategi yang sudah diformulasikan dan dapat dilaksanakan sudah sesuai. Dalam hal ini didalamnya sudah terbentuk UPTD dimana didalamnya sudah ada bagian pemeliharaan rumput, bagian pembersihan, kemudian bagian keamanan. Jadi sumber daya-sumber daya itu yang melekat dan sudah berjalan dalam satu tahun ini, jadi otomatis pemberdayaan masyarakat juga ada atau tenaga lokal yang digunakan.

Kata Kunci : Strategi Pemerintah dalam Tatakelola Perkotaan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata terindah yang patut diucapkan oleh peneliti selain puji syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, kesabaran, kekuatan serta ilmu pengetahuan kepada hambanya. Atas perkenaanNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan mempersembahkan skripsi ini, bukti dari perjuangan yang panjang nan melelahkan dan jawaban atas do'a dan senantiasa mengalir dari orang-orang terkasih. Sholawat serta salam "*Allahumma Sholli ala Sayyidina*" juga peneliti sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sang pejuang sejati yang telah membawa kita menuju zaman perdamaian.

Skripsi dengan judul "Strategi Pemerintah Daerah dalam Tatakelola Perkotaan di Lapangan Syekh Yusuf Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa" sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa mulai dari awal hingga akhir proses pembuatan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Ada banyak drama, rintangan dan hambatan yang selalu menyertainya. Hanya dengan kesabaran dan kerja keraslah sehingga membuat penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Juga dengan adanya berbagai bantuan baik berupa moril dan materil dari berbagai pihak sehingga mempermudah penyelesaian penulisan skripsi ini.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Mustakim Ms dan Ibunda Mawar C dan saudara-saudaraku serta keluarga besar yang selalu memberikan do'a, dukungan dan kasih sayang yang menjadi pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi penulis.

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd dan Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku pembimbing I dan II yang selalu memberikan arahan dan motivasi atas penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si selaku dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan motivasi kepada penulis selama 4 tahun menjalani jenjang pendidikan di bangku kuliah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

6. Para Dosen dan Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh informan yang berada di Kantor Dinas PUPR, atas kesediaannya memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengambil data dalam rangka merampungkan penelitian.
8. Saudara-saudara seperjuanganku di bangku perkuliahan angkatan 2016 terutama Jurusan Ilmu Pemerintahan kelas A yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
9. Teman-teman KKP Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa Terutama di Desa Bonto Kassi.
10. Kepada snack terbaik Bananaroll, Indomie, Thai Tea, Susu yang selalu menjadi cemilan dan minuman penulis selama begadang dalam pembuatan skripsi.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 25 Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengajuan Skripsi	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Bagan	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA FIKIR	
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Konsep Strategi	14
C. Konsep Pemerintahan Daerah	16
D. Konsep Urban Governance dan RTH	23
E. Teori Manajemen Strategi	34
F. Kerangka Fikir	36
G. Fokus Penelitian	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	41
B. Jenis dan Tipe Penelitian	41
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian	42
D. Informan Penelitian	43
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Analisis Data	46
G. Teknik Keabsahan Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian 49

B. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Tatakelola Perkotaan
di Lapangan Syech Yusuf Kabupaten Gowa 52

C. Hasil Penemuan Penelitian Strategi Pemerintah Daerah Dalam
Tatakelola Perkotaan di Lapangan Syech Yusuf 64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 67

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 61

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	41
-------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Harapan mewujudkan tata kelola urban governance dalam kehidupan pemerintahan dan masyarakat telah lama di upayakan oleh pemerintah daerah sebagai bagian terpenting dari sistem pemerintahan dan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Para bupati juga di setiap kabupaten banyak menyatakan ingin mewujudkan tata kelola urban governance. Namun, banyak pertanyaan yang muncul mencakup bagaimana mewujudkan tata kelola di setiap kabupaten, strategi apa yang berharap di lakukan untuk mewujudkan baik pemerintahan, juga bagaimana upaya yang tepat dalam menyediakan pelayanan masyarakat yang mampu memberikan rasa nyaman transparan bagi masyarakat. Pertanyaan pertanyaan tersebut tentu saja tidak mudah untuk jawabannya karena sejauh ini konsep baik pemerintahan sendiri memiliki arti yang luas dan sering di pahami beroperasi berbeda beda. Banyak orang jelaskan baik pemerintah secara berbeda karena tergantung pada kontesnya (Holle, 2011).

Berbicara tata kelola atau baik pemerintahan sebagai pelaksana aspek politik, ekonomi yang merupakan landasan untuk pembangunanya memiliki kewenangan adimistrasi untuk di kelola pemerintah daerah dalam semua tingkat. Tata kelola adalah proses keputusan untuk mempormulasikan kebijakan yang di mana yang menjadi sistem impelementasi dari kebijakan pemerintah daerah. Baik pemerintahan berarti kekuasaan yang berdasarkan pada peraturan perundan-

undangan yang berlaku di mana semua kebijakan di lakukan secara transparan juga bertanggung jawaban kepada masyarakat, yang di mana harus di dasari juga pada aspek kelembagaan bukan atas kehendak ini orang atau kelompok tertentu (Winandi, 1998).

Urban governance adalah peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan wilayah (Penataan Ruang). Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Di Provinsi Sulawesi Selatan. Kawasan Metropolitan Maminasata meliputi Kota Makassar Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Maminasata di Wilayah Kabupaten Gowa mencakup Kecamatan Bajeng, Barombong, Bontomarannu, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Manuju, Pattalassang, Palangga, Parangloe, dan Somba Opu (Adisasmita, 2012).

Tatakelola perkotaan (Urban Governance) semakin mengalami perkembangan di era otonomi daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian ini, maka otonomi daerah memberikan ruang dan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam perkembangan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan (UU Nomor 23 Tahun 2014).

Berdasarkan UU No 26 Tahun 2007, tentang penataan ruang. Menurut PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2018 tentang RT/RW tentang menetapkan metropolitan Mamminasata sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) UU NO 26 (2007). Bupati Gowa Adnan Puriheta Ichsan melaksanakan tata kelola penataan ruang di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Lapangan Syekh Yusuf Gowa digagas jadi ruang terbuka hijau terbaik di Sulawesi Selatan. Kepala dinas PU Gowa, Mendoap mengatakan, ruang terbuka hijau yang tengah dikembangkan di kawasan Lapangan Syekh Yusuf mencapai 4,5 hektar. Untuk mengerjakan itu, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 14 miliar yang diambil dari anggaran pokok. Kawasan ruang terbuka hijau di Lapangan Syekh Yusuf akan dilengkapi sarana olah raga dan juga tempat bermain anak. Pemerintah daerah menargetkan kawasan ini menjadi ruang terbuka hijau terbaik di Sulsel. Selain itu, pemerintah juga berencana membangun pusat jajan tradisional sehingga tidak ada lagi Pedagang Kaki Lunta (PKL) yang berjualan di sekitar Lapangan Syekh Yusuf (Sulselsatu.Com, 2018).

Berdasarkan RDTR kota baru gowa maros, yaitu terletak di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Somba Opu (Gowa) dan Kecamatan Moncongloe (Maros). Pembangunan kawasan ini bertujuan untuk membangun kota masa depan yang hijau, berkelanjutan, dan terpadu. Lapangan Syekh Yusuf Somba opu sebagai salah satu kawasan idaman yang memiliki prospek masa depan yang sangat baik karena sangat mudah pengaturan dan penataan dari sisi tata ruang. Dalam penelitian Sutawijaya 2004 jika lokasinya semakin mendekati kawasan pusat kota maka nilai ekonomis lahan semakin tinggi. Kawasan ini memiliki nilai strategis

antarlain berpotensi dari segi geografis, berpotensi dari segi fisik kawasan, dengan adanya pembangunan ini bertujuan untuk membangun kota satelit masa depan hijau, berkelanjutan, dan terpadu untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gowa khususnya di Kecamatan Somba opu (Akmal, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pemerintah Daerah dalam Tatakelola Perkotaan di Kecamatan Somba Opu di Kabupaten Gowa dengan menganalisis perinsip perinsip dalam urban governance terhadap pembagunan wilayah yang khususnya ada di kecamatan somba opu yang di kenal sebagai kawasan ruang terbuka hijau syekh yusuf discovery yang sedang di kembangkan oleh pemerintah daerah di kabupaten Gowa.

Metode penelitian yang di gunakan adalah diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Ada pun theknik yang di gunakan adalah "obseriatory participant", yang mengharuskan partisipasi peneliti secara langsung dalam sebuah masyarakat atau komunitas sosial tertentu. Penelitian ini berupaya untuk mendalami akan asumsi masyarakat terhadap peran pemerintah dalam pembagunan dalam kinerja pemerintah yang ada di kecamatan somba opu di kabupaten gowa sehingga akan di peroleh pendalaman informasi mengenai efisiensi pembagunan yang di laksanakan berdasarkan perinsip perinsip good urban governance.

Harapan mewujudkan tata kelola urban governance dalam kehidupan pemerintahan dan masyarakat telah lama di upayakan oleh pemerintah daerah sebagai bagian terpenting dari sistem pemerintahan. Akan tetapi ada beberapa fasilitas-fasilitas yang di sediakan oleh Pemerintah yang ada di lapangan Syech

Yusuf itu mengalami kerusakan. Maka dari itu perlu peninjauan yang ketat di sekeliling lapangan Syekh Yusuf Gowa.

Penelitian yang dilaksanakan kawasan lapangan syekh yusuf kecamatan somba opu kabupaten gowa sebab kawasan ini dijadikan sebagai fokus utama penelitian dalam menggali informasi akan penataan ruang kabupaten gowa serta pertimbangan bahwa kawasan ini di peruntukkan untuk ruagan terbuka hijau. Untuk perdalam analisis data yang berkaitan dengan perang pemerintah daerah dalam pembagunan kawasan ruang terbuka hijau yang di dasarkan atas efektivitas dalam perinsip perinsip good urban governance di kecamatan somba opu di kabupaten gowa maka di lakukan wawancara secara mendalam dengan informan dari masyarakat yang mendomisili kawasan lapangan syekh yusuf dengan tehknik penentuan informal di lakukan secara furfosivy sampling di mana penentuan sampel dalam penelitian ini tidak di lakukan pada seluruh populasi, tapi terfokus pada target. Namun demikian, pendalaman informasi dalam penelitian ini perkemban mengikuti informasi yang ada atau di butuhkan (snowball), sehingga memungkinkan melibatkan pihak pemerintah daerah dalam hal ini dinas tata ruang dan bangunan di kabupaten gowa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai strategi pemerintah daerah yang ada di kabupaten gowa, sehingga mengangkat judul: **“Strategi Pemerintah Daerah dalam Tatakelola Perkotaan di Lapangan Syekh Yusuf Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini yaitu: Strategi Pemerintah Daerah dalam Tatakelola Perkotaan di Lapangan Syekh Yusuf Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui Strategi Pemerintah Daerah dalam Tatakelola Perkotaan di Lapangan Syekh Yusuf Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

2. Manfaat Penelitian

1. Memperoleh beberapa fenomena terhadap Strategi Pemerintah Daerah dalam Tatakelola Perkotaan di Lapangan Syekh Yusuf Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
2. Sebagai masukan dan saran bagi pemerintah mengenai strategi pembangunan daerah dan penataan ruang terbuka hijau yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan seseorang sebelumnya yang berkaitan dengan tema atau permasalahan pada penelitian ini. Pada penelitian terdahulu kali ini terdiri atas beberapa penelitian yang terkait dengan konteks good urban governance, urban governance atau manajemen perkotaan, dan secara khusus mengenai penataan permukiman kumuh. Selanjutnya, penelitian-penelitian tersebut akan dijelaskan dalam beberapa aspek meliputi kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Berikut penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi penulisan penelitian ini yaitu.

Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Muchlas M.Tahir Tahun 2015 dengan Judul Penelitian Good Urban Governance, Peran Pemerintah dalam Pembangunan Wilayah Kecamatan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan Teori tentang Good Urban Governance. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu Hasil dari menggunakan analisis konsep good urban governance yang terdiri atas beberapa prinsip seperti keberlanjutan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat tidaklah terlaksana dengan baik. Karena masih memiliki kekurangan dari segi efektifitas dan efisiensi yang terdapat pada tiap prinsip-prinsip.

Kemudian Penelitian terdahulu yang Kedua dilakukan oleh Bambang Utoyo S Tahun 2014 dengan Judul Penelitian Pengaruh Prinsip Good Governance dalam

Penataan Ruang di Kota Metro Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan Teori Good Governance. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan dan pengaruh yang nyata dan signifikan antara prinsip good governance yang meliputi akuntabilitas, responsifitas, transparansi, dan partisipasi terhadap perencanaan tata ruang kota. Sehingga kebijakan penataan ruang kota perlu mengoperasionalkan prinsip good governance dalam rangka mewujudkan tata kelola perkotaan yang baik.

Penelitian terdahulu yang Ketiga dilakukan oleh Tommy Firman Tahun 2014 dengan Judul Penelitian Inter-local Government Partnership for Urban Management in Decentralizing Indonesia: from below or above? Karmantul (Greater Yogyakarta) and Jabodetabek (Greater Jakarta Compared. Penelitian ini menggunakan Teori Intergovernmental Partnership. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu Hasil temuan menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan dalam manajemen perkotaan baik di Karmantul maupun Jabodetabel membutuhkan aspek keterlibatan pemerintah pusat melalui kebijakan dan kemauan politik yang tinggi, insentif, dan kompensasi dari pemerintah. Selain itu, dari segi lokal juga membutuhkan visi dari kepala daerah, kepercayaan antar pemerintah daerah, transparansi, kolaborasi kepemimpinan yang kuat.

Penelitian terdahulu yang Keempat dilakukan oleh Ahmad Fawahid Tahun 2016 dengan Judul Penelitian Manajemen Perkotaan (Studi Kasus Penataan Drainase di Kota Pekanbaru). Penelitian ini menggunakan Teori Manajemen Perkotaan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa manajemen perkotaan dilakukan melalui proses

Harapan mewujudkan tata kelola urban governance dalam kehidupan pemerintahan dan masyarakat telah lama di upayakan oleh pemerintah daerah sebagai bagian terpenting dari sistem pemerintahan. Akan tetapi ada beberapa fasilitas-fasilitas yang di sediakan oleh Pemerintah yang ada di lapangan Syech Yusuf itu mengalami kerusakan. Maka dari itu perlu penjagaan yang ketat di sekeliling lapangan Syech Yusuf Gowa.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul penulisan peneliti	Teori/pendekatan	Hasil Temuan
1	Good Urban Governance peran Pemerintah dalam Pembangunan Wilayah Kecamatan di Kota Makasar (Muchlas M.Tahir, 2015)	Good Urban governance	Hasil dari menggunakan analisi konsep good urban governance yang terdiri atas beberapa prinsip seperti keberlanjutan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat tidaklah terlaksana dengan baik. Karena masih memiliki kekurangan dari segi efektifitas dan efisiensi yang terdapat pada tiap

<p>Indonesia: from below or above? Karmantul (Greater Yogyakarta) and Jabodetabek (Greater Jakarta) Compared. (Tommy Firman 2014)</p>		<p>aspek keterlibatan pemerintah pusat melalui kebijakan dan kemauan politik yang tinggi, insentif, dan kompensasi dari pemerintah. Selain itu, dari segi lokal juga membutuhkan visi dari kepala daerah, kepercayaan antar pemerintah daerah, transparansi, kolaborasi kepemimpinan yang kuat.</p>
<p>4. Manajemen Perkotaan (Studi Kasus Penataan Drainase di Kota Pekanbaru) (Ahmad Fawahid, 2016)</p>	<p>Manajemen Perkotaan</p>	<p>Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa manajemen perkotaan dilakukan melalui proses perencanaan, penetapan tugas, directing, dan pengawasan. Perencanaan dilakukan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya yang mengacu pada master plan</p>

			<p>dari pemerintah kota.</p> <p>Penetapan tugas merujuk pada pelaksanaan program yang dilakukan sesuai dengan bidang yang berwenang. Directing dilakukan melalui proses pengarahan dan kordinasi antara pihak yang terkait.</p> <p>Pengawasan dilakukan Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil dari pelaksanaan program.</p>
5	<p>Evaluasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Kasus Program Peremajaan Kawasan</p>	Evaluasi	<p>Hasil temuan yang didapat menunjukkan bahwa berdasarkan hasil respon dari masyarakat menunjukkan kepuasan yang tinggi dari masyarakat terhadap adanya program</p>

	<p>Tegalpanggung Kota Yogyakarta) (Bani Putri Yulianti dkk. 2015)</p>		<p>peremajaan kawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu dari segi infrastruktur ada perubahan yang signifikan daripada sebelumnya dan telah mencapai tujuan yakni menjadi kawasan yang lebih berkembang sesuai dengan potensi lokal.</p>
6	<p>Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Studi Penentuan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kota</p>	<p>Perencanaan dengan pendekatan Analisis SWOT</p>	<p>Hasil Analisis SWOT merekomendasikan beberapa aspek yakni pemerintah perlu melakukan penyusunan rencana peningkatan kualitas infrastruktur pada kawasan permukiman kumuh; melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan; melibatkan masyarakat dalam perumusan rencana;</p>

	Malang (Donny Wahyu Wijaya, 2016).		meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemanfaatan wilayah kota pada kawasan sempadan dan bantaran; meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat; mengupayakan kerjasama dengan sektor swasta dalam peningkatan kualitas infrastruktur permukiman kumuh
7	Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh dan Strategi Penanganan pada Permukiman Kumuh di Kelurahan Rangas Kecamatan	Strategi dengan pendekatan Analisis SWOT	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pada analisis SWOT, maka strategi yang perlu dilakukan yakni melakukan dua bentuk program, program penataan fisik melalui program perbaikan drainase dan peningkatan prasarana jalan dan program non fisik

Banggae Kabupaten Majene (Muhajir Syam, 2017)		melalui pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dan pendampingan atau supervisi dalam proses perbaikan drainase.
--	--	---

Sumber: Hasil olahan Peneliti, 2018

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dimana sama-sama membahas mengenai manajemen perkotaan atau urban governance baik secara umum maupun secara khusus pada konteks penanganan permukiman kumuh. Akan tetapi dalam penelitian terdahulu di atas dapat dibilang cukup memiliki perbedaan dengan penelitian, baik dari segi teori yang dipergunakan dan fokus penelitian. Selain itu, penanganan permukiman kumuh pada penelitian terdahulu juga menunjukkan penanganan yang bersifat umum. Berbeda dengan peneliti yang mengkaitnya dengan konteks pengembangan kampung tematik secara suatu upaya penanganan permukiman kumuh.

B. Konsep Strategi

Menurut Makmur (2019) Strategi adalah suatu tindakan yang berpengaruh dan sangat menentukan keberhasilan terhadap program atau kegiatan, baik yang akan maupun yang telah direncanakan oleh pihak manajemen.

Menurut Allison (2013) Strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi, strategi juga adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi.

Secara umum strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi, yakni pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi. Definisi ini disesuaikan dengan kata strategi berasal dari kata kerja bahasa Yunani *stratego* yang berarti merencanakan pemusnahan musuh lewat penggunaan sumber-sumber yang efektif. Strategi dimaknai sebagai suatu cara atau kita mencapai tujuan tertentu (Effendi, 2005).

Menurut Fred R. David (2010) strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Merupakan aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Strategi mempengaruhi perkembangan jangka panjang perusahaan dan berorientasi pada masa yang akan datang.

David (2006) Strategi merupakan suatu cara yang digunakan dalam menjalankan organisasi sehingga apa yang diinginkan organisasi akan dapat dicapai sesuai dengan misi dan tujuan organisasi tersebut. Kemudian menurut Quadrat (2007) strategi adalah perioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi, sehingga misi-misi dalam organisasi dapat teralisasi.

Sofjan Assauri (2011) menyatakan bahwa strategi merupakan suatu pernyataan yang mengarahkan bagaimana masing-masing individu dapat bekerja sama dalam suatu organisasi, dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi tersebut. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai (Marrus, 2002).

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan, guna mencapai tujuan. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Jadi merumuskan strategi berarti memperhitungkan situasi dan kondisi (ruang dan waktu) yang akan dihadapi di masa yang akan datang guna mencapai efektifitas.

C. Konsep Pemerintahan Daerah

a. Pemerintahan Daerah

Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007).

Tjahja Supriatna (dalam Hanif 2007) yang menyeter pendapat de Guzman dan Taples menjelaskan bahwa unsur-unsur pemerintahan daerah:

- a. Pemerintah daerah adalah subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan Negara;
- b. Pemerintah daerah diatur oleh hukum;
- c. Pemerintah daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat;
- d. Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan;
- e. Pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya.

Dikaitkan dengan fungsi umum pemerintahan maka unsur-unsur pemerintahan daerah di atas masih ditambah dengan Pemerintah daerah melaksanakan pembangunan daerah dan memberdayakan masyarakat daerah dalam wilayah yurisdiksinya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep pemerintahan daerah di dalamnya melingkupi organisasi/lembaga/institusi, fungsi/kegiatan pemerintahan dan daerah pemerintahan. Kemudian untuk lebih memahami makna dari pemerintahan daerah di bawah ini diuraikan beberapa dimensi yang menyangkut pengertian Pemerintahan daerah.

- a. Dimensi Sosial Konsep pemerintahan daerah dipandang sebagai suatu kelompok Masyarakat yang terorganisasi yang mendiami/bertempat tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan batasan geografis tertentu serta memiliki ciri-ciri tertentu pula.

- b. Dimensi Ekonomi Pemerintah daerah dipahami sebagai organisasi pemerintahan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang terkait erat dengan kondisi an potensi dari daerah tertentu. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pembangunan pemerintahan daerah, potensi ekonomi daerah menjadi satu indikator penting baik untuk pemekaran daerah maupun untuk penyerahan urusan daerah. Setiap penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah seharusnya memperhatikan potensi ekonomi daerah. Hal ini penting agar dalam kelanjutan pengelolaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, demikian pula dengan pemekaran daerah (pembentukan daerah otonom baru) potensi ekonomi daerah menjadi indikator utama dalam mempertimbangkan bisa idaknya daerah itu dimekarkan.
- c. Dimensi Geografi Pemerintahan daerah dipahami sebagai suatu unit organisasi pemerintahan yang mempunyai lingkungan geografis dengan ciri-ciri tertentu, yang meliputi keadaan fisik geografis tertentu, demografis tertentu dan potensi ekonomi tertentu. Ciri-ciri geografis ini dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan maupun pembinaan masyarakat, juga terhadap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah maupun tugastugas administrasi lainnya.
- d. Dimensi Hukum Pemerintah daerah dipandang sebagai suatu unit badan hukum publik. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik

pemerintah daerah di samping dipandang sebagai unit organisasi pelaksana pemerintah pusat, pemerintah daerah juga merupakan suatu organisasi mandiri yang mewakili kepentingan masyarakat di daerahnya. Hal ini mengandung arti dalam batasbatas tertentu pemerintah daerah diserahi urusan pemerintahan tertentu untuk diatur, diurus dan dikelola, terkait dengan hal ini pemerintah dapat membuat kebijakan baik berwujud peraturan daerah dan atau peraturan dan atau keputusan Kepala daerah guna menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan dimaksud. Sebagai badan hukum publik pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangganya sekaligus pemerintah juga diberi kewenangan untuk memiliki harta kekayaan sendiri serta mewakili organisasinya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan dimensi ini pemerintah daerah mempunyai tiga karakteristik:

- a) Keberadaan pemerintah daerah itu harus merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan memiliki organisasi sendiri serta memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- b) Memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau juga sering ditafsirkan memiliki pemerintahan sendiri itu dicerminkan dengan dimilikinya satu Badan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c) Mempunyai hak untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atau pihak-pihak di luar organisasi pemerintahan daerah.

d) Dimensi Politik Pemerintah daerah dipandang mempunyai hubungan langsung dengan aspek-aspek atau merupakan bagian dari sistem politik negara yang bersangkutan. Dalam mengimplementasikan fungsinya, pemerintah daerah merupakan agen/pelaksana pemerintah pusat. Dengan kata lain, pemerintah daerah merupakan satu mekanisme yang terintegrasi dalam satu pemerintahan negara yang berbentuk sebagai badan hukum publik. Dalam kaitan ini, pemerintah daerah sekalipun menyelenggarakan kewenangan pemerintahan sendiri tetapi tidak dalam artian kemutlakan, ada power sharing untuk satu urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah bukan berarti secara keseluruhannya, namun ada aspek-aspek tertentu yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat.

e) Dimensi Administrasi Pemerintah daerah dipahami sebagai suatu organisasi pemerintahan sendiri (Local Self Government). Pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangganya. Di Indonesia implementasinya diwujudkan dalam pembuatan peraturan daerah artinya peraturan ini hanya dibuat untuk mengatur urusan pemerintah yang menjadi urusan rumah tangga daerah dan pengadministrasiannya dipisahkan dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi urusan pemerintah pusat.

b. Tujuan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah sebagai salah satu subsistem dari sistem Pemerintah Indonesia adalah unsur utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.

Oleh karena itu, tujuannya sama dengan Pemerintah Pusat, yaitu mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika dilihat dari aspek manajemen terdapat pembagian wewenang tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Akan tetapi, tanggung jawab terakhir tetap berada di tangan Pemerintah Pusat.

Apabila disimak secara saksama dibalik pertimbangan-pertimbangan tentang perlu adanya penyerahan kewenangan kepada Pemerintah di Daerah sebagaimana telah diungkapkan terdahulu, dikandung maksud dan tujuan berikut.

- a. Secara politis untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dikonstruksikan dalam sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah yang memberi peluang turut sertanya rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Secara formal dan konstitusional untuk melaksanakan ketentuan dan amanat UUD 1945.
- c. Secara operasional, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pelayanan masyarakat dan melancarkan pelaksanaan pembangunan.
- d. Secara Administrasi pemerintahan untuk lebih memperlancar dan menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan secara lebih baik dalam rangka good governance;

- e. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas maka kegiatan Pemerintahan Daerah harus terarah kepada terjaminnya pertumbuhan pembangunan Daerah, terselenggaranya pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa dan terjaminnya hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tujuan pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk

- a. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
- b. Daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.
- d. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.
- f. Perlu memperhatikan peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- g. Daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa tujuan pemberian otonomi kepada daerah itu menurut UU 32 tahun 2004 adalah untuk:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b. Meningkatkan daya saing daerah
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- d. Memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah.

D. Konsep Urban Governance dan RTH

Permasalahan utama dalam tata kelola atau penanganan kawasan perkotaan adalah meningkatnya kebutuhan pelayanan perkotaan, terbatasnya kemampuan pengelolaan perkotaan khususnya dalam pengelolaan sumber pembiayaan, meningkatnya masalah sosial masyarakat di kawasan perkotaan, meluasnya kawasan kumuh sehingga menurunnya kualitas lingkungan hidup di kawasan perkotaan, rendahnya pengelolaan lalu lintas dan transportasi umum di kawasan perkotaan, belum baiknya sistem penataan ruang perkotaan dan penataan lahan perkotaan (Rohardjo, 2010).

Lebih lanjut Adisasmita berpendapat bahwa tantangan utama yang dihadapi dalam rangka pengelolaan kawasan perkotaan adalah meningkatnya peran kota untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat seperti

lapangan kerja, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan umum lainnya bagi seluruh lapisan masyarakat. Tantangan penting lainnya adalah menciptakan ketertiban umum dan rasa aman masyarakat, peningkatan pelayanan umum, ketertiban dalam penataan (Adisasmita, 2010).

Oleh karena dalam rangka melakukan penataan yang tepat maka sangat diperlukan suatu urban governance atau tata kelola perkotaan. Urban governance muncul sebagai respon atas kompleksitas permasalahan perkotaan yang mana upaya penyelesaiannya tidak dapat dituntaskan dalam bentuk birokrasi tradisional, namun dengan melakukan jejaring antar organisasi. Dengan demikian Urban Governance dimaknai bahwa penyelesaian permasalahan hanya bisa diselesaikan dengan tidak hanya bergantung pada kekuasaan dan peranan manajerial pemerintah semata, namun juga pada tataran lokal harus dibangun hubungan kerjasama dan kolaborasi yang kuat dalam memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal yang ada. Sehingga urban governance dapat menjadi strategi untuk mengembangkan kapasitas kelembagan di tataran lokal dengan mengembangkan modal sosial sehingga diharapkan permasalahanyang muncul dapat terselesaikan. Hal ini dipahami bahwa urban governance sangat memberikan ruang bagi adanya peran institusi lokal baik dari pemerintah daerah maupun partisipasi dari masyarakat (Keban, 2008).

Tiga aktor yang berpengaruh dalam proses *governance*. Tiga aktor tersebut yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. ketiga aktor tersebut saling berkolaborasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintah. melainkan

memerlukan aktor lain karena keterbatasan kemampuan pemerintah. Swasta dengan dukungan finansialnya harus mampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Swasta dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk mengurus kepentingannya sendiri yakni hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi (Abidin, 2013).

Selain itu, Richard E. Stren mengungkapkan pendapat mengenai tatakelola perkotaan yang lebih bersifat teknis dan mencakup beberapa hal berikut ini:

1. Proyek pembangunan perkotaan dalam konteks wilayah kota dan pertimbangan kelembagaan.
2. Memusatkan perhatian pada sumber daya keuangan lokal untuk memperkuat desentralisasi.
3. Memusatkan perhatian pada berbagai alternatif untuk mengorganisir dan membiayai pelayanan kota seperti : air bersih, transportasi, listrik sampah, kesehatan, dan lain-lain.
4. Perhatian untuk mencari dan mempromosikan partisipasi masyarakat dalam pelayanan infrastruktur kota.

Beberapa aspek manajemen perkotaan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan urban governance atau tata kelola perkotaan perlu mempertimbangkan dari segi kelembagaan atau pelaksana manajemen perkotaan. Urban governance perlu menekankan pada kemampuan keuangan daerah sehingga dapat mendukung operasional pelaksanaan manajemen perkotaan. Hal ini karena manajemen perkotaan dilakukan dengan melakukan peningkatan kualitas infrastruktur fisik suatu kotaseperti pada penyediaan pelayanan publik diberbagai

bidang yakni penyediaan air bersih, listrik, tempat tinggal yang layak, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Selain itu, manajemen perkotaan juga tidak lupa perlu melibatkan atau memberi ruang kepada partisipasi masyarakat (Ngindana, 2017).

Salah satu permasalahan perkotaan yang kompleks dan urgen untuk diatasi yakni menyangkut penanganan permukiman kumuh. Oleh karenanya urban governance atau tata kelola kota dapat menjadi strategi dalam penanganan permukiman kumuh. Hal ini karena dalam permukiman kumuh dibutuhkan upaya untuk peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman dan juga perlu melibatkan partisipasi masyarakat serta kontribusi dari pihak swasta dalam penanganannya pendidikan dan kesehatan. Selain itu, manajemen perkotaan juga tidak lupa perlu melibatkan atau memberi ruang kepada partisipasi masyarakat. Salah satu permasalahan perkotaan yang kompleks dan urgen untuk diatasi yakni menyangkut penanganan permukiman kumuh. Oleh karenanya urban governance atau tata kelola kota dapat menjadi strategi dalam penanganan permukiman kumuh. Hal ini karena dalam permukiman kumuh dibutuhkan upaya untuk peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman dan juga perlu melibatkan partisipasi masyarakat serta kontribusi dari pihak swasta dalam penanganannya (Sedarmayanti, 2003).

Jumlah penduduk yang semakin banyak dan padat menyebabkan terjadinya kekurangan atau krisis lahan untuk berbagai keperluan dan penggunaan lahan. Oleh sebab itu, penting dilakukannya sebuah tata dan perencanaan suatu wilayah. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar wilayah tersebut memiliki proporsi penggunaan lahan yang sesuai dengan keseimbangan lingkungan yang tetap

terjaga. Salah satu kawasan yang menjadi penting dalam suatu perencanaan wilayah adalah kawasan terbuka hijau (Rahman, 2006).

Kawasan ini harus ada setiap wilayah sebagai penyeimbang ekosistem. Sesuai dengan namanya. Maka kawasan ini merupakan kawasan dengan pegetasi yang mendominasi dalam ekosistemnya. Kawasan ini sangat diperlukan dalam suatu wilayah terutama wilayah yang memiliki tingkat polusi dan kepadatan lalu lintas serta penduduk yang tinggi mengingat fungsi utamanya yaitu untuk menjaga kualitas lingkungan (Siaka, 2008).

Menurut UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang atau jalur atau mengelompok penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau adalah suatu ruang terbuka yang kawasannya didominasi oleh pegetasi baik itu pepohonan, semak, rumput, serta pegetasi penutup tanah lainnya (UU No 26 Tahun 2007).

Kawasan ini didirikan berdasarkan kebutuhan dan peruntukan dalam wilayah tersebut. Tidak hanya untuk menjaga dan menyeimbangkan kondisi lingkungan atau ekosistem sekitarnya, tetapi juga menyediakan tempat untuk melakukan aktivitas sosial yang memadukan dengan estetika alam.

Berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum nomor 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, pengertian ruang terbuka hijau adalah ruang memanjang/jalur atau

mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamia maupun yang sengaja di tanam.

Berikut adalah berbagai penjelasan mengenai fungsi dan manfaat dari ruang terbuka hijau(RTH).

Dalam perencanaanya, ruang terbuka hijau memiliki beberapa fungsi. Fungsi-fungsi ini dapat di sesuaikan dengan kebutuhan lingkungan dengan kawasan tersebut :

1. Fungsi Ekologis

Pertama ada fungsi ekologis yaitu area ini dibuat dengan fungsi untuk meningkatkan kualitas lingkungan seperti peningkatan kualitas air tanah, mengurangi peluan terjadinya banjir, mengurangi polusi udara, dan memiliki peran dalam pembentukan serta pengaturan iklim mikro.

2. Fungsi Sosial Budaya

Selain itu, ada juga fungsi sosial budaya. Ruang terbuka hijau didirikan atau dibangun dengan harapan mampu untuk memberikan fungsi sosial budaya bagi masyarakat. Area ini dapat menjadi tempat atau ruang dalam kegiatan interaksi sosial, sarana rekreasi, penanda kawasan, hingga menjadi tempat penelitian dan pendidikan.

3. Fungsi Ekonomi

- a. Dimana area ini tidak hanya memberikan fungsi ekologis, tetapi juga dapat dapat berkontribusi dalam bidang ekonomi.

- b. Tempat ini dapat dijadikan dan dikembangkan sebagai daerah wisata hijau diperkotaan yang dapat meningkatkan daya tarik bagi masyarakat, wisatawan lokal, hingga wisatawan asing untuk mengunjungi tempat ini.

4. Fungsi Ekstetika

- a. Fungsi ekstetika sudah pasti ada dalam area ini. Perencanaan dan penataan yang sudah dilakukan dengan baik tentu saja tidak menhiraukan sisi keindahan yang akan ditunjukkan dari area ini.
- b. Ruang terbuka hijau akan memberikan nilai ekstetika sehingga meningkatkan kenyamanan masyarakat akan kawasan tersebut melalui jalur hijau dan keberadaan taman.

Berbeda dengan fungsi, adapula manfaat yang diberikan. Manfaat ini dapat diperoleh dari fungsi-fungsi yang ada. Manfaat yang diperoleh terbagi menjadi dua, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung.

1. Manfaat Langsung

Manfaat langsung adalah manfaat yang bisa langsung di rasakan oleh masyarakat, pengunjung, ataupun pihak lainya. Salasatunya adalah manfaat yang di peroleh dari fungsi estetika seperti keindahan yang membuat masyarakat serta orang orang yang berkunjung kearaeah ini merasa nyaman. Selain itu, juga di dapatkan dari fungsi sosial budaya yang menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan itraksi serta rekreasi.

meredam suara-suara bising serta polusi yang pada umumnya dihasilkan oleh kendaraan. Taman kota dapat memperchantik kota dan memberikan kesan natural ditengah-tengah kepadatan daerah perkotaan.

c. Penyediaan RTH

Penyediaan kawasan ruang terbuka hijau terbagi menjadi tiga berdasarkan peraturan menteri pekerjaan nomor 05/PR/1/M/2008 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruagan terbuka di kawasan perkotaan

a. Berdasarkan Luas Wilayah

Penyediaan berdasarkan luas wilaya pada daerah perkotaan minimal harus ada 30%. Proposi ini menjadi dua yaitu 20% untuk ruang terbuka hijau publik dan 10% untuk ruang terbuka hijau prifat jika dalam suatu wilaya perkotaan terdapat luasnya lebih dari 30% luasan tersebut harus di pertahankan. Hal ini karena 30% adalah kemampuan minimal suatu kawasan untuk menjaga keseimbangan lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan, menciptakan iklim mikro, hingga menyediakan lingkungan alami secara estetika untuk wilaya perkotaan.

b. Berdasarkan Jumlah Penduduk

Penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk di bagi menjadi lima skema

a. Pembagiannya yaitu 250 jiwa, 2500 jiwa, 30.000 jiwa, 120 jiwa, dan 480 jiwa.

b. Klasifikasinya mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, hingga kota.

adalah lokasi penyebarannya yang disesuaikan dengan kebutuhan, jumlah penduduk hingga luasnya.

a. Prosedur Perencanaan

Untuk merencanakan ruang terbuka hijau, terdapat beberapa prosedur perencanaan RTH yang harus dilakukan., Berikut adalah penjelasannya secara runtut Arsyad (2012)

- a. Ruang terbuka hijau harus ditentukan dahulu peruntukannya yang sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan pemerintah daerah untuk keputusan penyediaan RTH.
- b. Untuk ruang terbuka hijau publik, pemanfaatan serta penyediaanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah menurut ketentuan dari peraturan yang berlaku.
- c. Tahan untuk melakukan penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik adalah perencanaan, pengadaan lahan, perancangan teknik, pelaksanaan pembangunan ruang terbuka hijau, dan pemanfaatan serta pemeliharaan.
- d. Ruang terbuka hijau privat penyediaan dan pemanfaatan dilakukan oleh masyarakat atau pemilik sesuai dengan perizinan pembangunan.
- e. Ruang terbuka hijau dimanfaatkan untuk penggunaan lain harus menuruti ketentuan serta peraturan daerah yang berlaku., tidak mengganggu pertumbuhan tanaman, tidak merusak estetika kawasan, tidak menghiraukan keamanan dan kenyamanan masyarakat atau

pengunjung, dan tidak merusak fungsi ekologis, estetika serta sosial budaya kawasan ini, serta

- f. Pedoman Penyediaan RTH di Perkotaan pedoman serta kriteria dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan ruang terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Namun, pada kenyataannya banyak wilayah-wilayah di Indonesia tidak memiliki ruang terbuka hijau yang memenuhi standar fungsi dan manfaat dari kawasan ruang terbuka hijau yang berlaku menjadi alasan bahwa kawasan ini harus ada di setiap wilayah di Indonesia.

E. Teori Manajemen Strategi

Menurut Fred R. David (2010) manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas-fungsional yang memapukan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Manajemen strategi berfokus pada usaha untuk mengintegrasikan manajemen, pemasaran, keuangan, produksi, penelitian dan pengembangan, serta system informasi computer untuk mencapai keberhasilan organisasional. Tujuan manajemen strategi adalah mengeksploitasi serta menciptakan berbagai peluang baru dan berbeda untuk perencanaan jangka panjang dan berusaha untuk mengoptimalkan tren-tren saat ini untuk masa yang akan datang.

Fred R. David menjelaskan bahwa proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahapan, yaitu, memformulasikan strategi, mengimplementasikan strategi dan mengevaluasi strategi.

Tahap memformulasikan strategi antara lain menetapkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi dari sudut pandang eksternal, menetapkan kelemahan dan keunggulan yang dimiliki organisasi dari sudut pandang internal, menyusun rencana jangka panjang, membuat strategi-strategi alternatif dan memilih strategi tertentu yang akan dicapai.

Tahap mengimplementasikan strategi memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi pegawai, dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sehingga strategi yang sudah diformulasikan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilisasi sistem informasi serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi. Mengimplementasikan strategi sering disebut sebagai "action stage" dari manajemen strategis. Pengimplementasian strategi memiliki maksud memobilisasi para pegawai dan manajer untuk menterjemahkan strategi yang sudah diformulasikan menjadi aksi.

Tahap mengevaluasi strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategis. Para manajer sangat perlu untuk mengetahui ketika ada strategi yang

Tatakelola perkotaan (Urban Governance) semakin mengalami perkembangan di era otonomi daerah. Berdasarkan UU Nomor 32/2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian ini, maka otonomi daerah memberikan ruang dan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam perkembangan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan (UU Nomor 32, 2004).

Berdasarkan UU No 26 Tahun 2007, tentang penataan ruang. Menurut PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2018 tentang RT/RW tentang menetapkan metropolitan Mamminasata sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) UU NO 26 (2007).

Bupati Gowa Adnan Purihcta Ichsan melaksanakan tata kelola penataan ruang di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Lapangan Syekh Yusuf Gowa digagas jadi ruang terbuka hijau terbaik di Sulawesi Selatan. Kepala dinas PU Gowa, Mendoap mengatakan, ruang terbuka hijau yang tengah dikembangkan di kawasan Lapangan Syekh Yusuf mencapai 4,5 hektar. Untuk mengerjakan itu, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 14 miliar yang diambil dari anggaran pokok. Kawasan ruang terbuka hijau di Lapangan Syekh Yusuf akan dilengkapi sarana olah raga dan juga tempat bermain anak. Pemerintah daerah menargetkan kawasan ini menjadi ruang terbuka hijau terbaik di Sulsel. Selain itu, pemerintah juga berencana membangun pusat jajan tradisional sehingga tidak ada

belum diresmikan oleh Pemerintah yang bersangkutan akan tetapi saat ini Pemerintah sementara mencari waktu yang tepat untuk segera meresmikan RTH di Lapangan Syech Yusuf.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Gowa tepatnya di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Gowa. Penelitian lebih lanjut akan dilaksanakan kurang lebih dua bulan sampai data yang diinginkan peneliti dapat terpenuhi dengan sempurna.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Untuk menjelaskan “Strategi Pemerintah Daerah dalam Tatakelola Perkotaan di Lapangan Syekh Yusuf Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”. Metode ini bertujuan untuk Mengetahui Strategi Pemerintah Daerah dalam Tatakelola Perkotaan di Lapangan Syekh Yusuf Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

Menurut Wirartha (2006) metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang mengumpulkan hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di dalam antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

Moleong (2006) Penelitian dekskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung. Dalam penelitian kualitatif oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat

hal ini sumber data utama (data primer) diperoleh langsung dari setiap informan yang diwawancarai secara langsung di lokasi penelitian. Data sekunder adalah data-data yang dapat diperoleh dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, hasil rapat perkumpulan, sampai dokumentasi-dokumentasi resmi dari alam lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementerian-kementerian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti berusaha memberikan gambaran atau uraian yang bersifat deskriptif mengenai keadaan objek yang diteliti secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta yang ada. Dasar penelitian yang digunakan digunakan dalam penelitian adalah studi kasus, yaitu dilakukan secara intensif dan komprehensif menjawab permasalahan yang teliti, Sugiyono (2018).

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi informan penelitian yakni Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas PUPR yaitu Staff Dinas Tata Ruang Seksi Bangunan Gedung, Seksi Pemanfaatan Ruang, Seksi Perencanaan Ruang dan Masyarakat. Teknik penentuan informan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling* yaitu penarikan informan secara *purposif* merupakan cara penarikan informan yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. Salah pertimbangan yang dilakukan oleh penulis adalah

kompetensi yang dimiliki dalam bidang yang dikuasai oleh informan tersebut. Teknik pemilihan sample bertujuan (*purposive*) yakni pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan (Ahmadin, 2013).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang dimaksud yakni:

a. Tehknik observasi

Malyadin (2013) mengemukakan penelitian mengadakan observasi penelitian secara partisipan yaitu dengan observasi yang tidak hanya melihat langsung tapi juga melakukan tindakan yang sama seperti objek penelitian. Observasi ini juga dilakukan dengan cara melihat langsung keadaan disekitar dan semua hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperlukan akan lebih lengkap dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

Observasi partisipan dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu observasi pasif, moderat, aktif, dan kompleks (Sugiyono, 2018). Namun yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif, moderat, dan aktif yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a) Observasi partisipasi pasif, peneliti datang dilokasi penelitian tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan masyarakat hanya melakukan pengamatan dari jauh.

- b) Observasi partisipasi moderat, observasi ini meneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya.
- c) Observasi partisipasi aktif, dalam observasi ini peneliti ikut melaksanakan apa yang dilakukan informan peneliti, tetapi belum menyeluruh.

b. Teknik Wawancara

Malyadin (2013) menyatakan wawancara merupakan salah satu cara mengumpulkan data dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Instrumen ini di gunakan mendapatkan informasi mengenai fakta, keyakinan, perasaan, niat dan sebagainya. Wawancara memiliki sifat yang luas, pertanyaan yang di berikan dapat disesuaikan dengan subyek sehingga segala sesuatu yang ingin di ungkapkan dapat di gali dengan baik. Wawancara terbagi atas dua jenis yaitu wawancara tidak berstruktur. Menurut Estemberg dalam Sugiyono (2010) mengemukakan dua jenis wawancara, yaitu wawancara struktur dan tidak struktur yaitu:

- a) Wawancara terstruktur (*strukter interview*): Wawancara terstruktur (*strukter interview*) digunakan sebagai teknik pengumpulan bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan di peroleh (terarah). Oleh karna itu, dalam melakukan wawancara, pewacara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

b) Wawancara tidak bertsruktur (*instrutured interview*): Wawancara tidak bertsruktur (*instrutured interview*) merupakan wawancara yang bebas dan peneliti tidak pedoman wawancara, yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara di gunakan berupa garis-garis merupa yang akan di tanyakan.

Dari kedua jenis wawancara di atas terkait dengan teknik wawancara maka peneliti akan dapat melakukan wawancara sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari wawancara. Karena dari kedua jenis wawancara tersebut bisa memberikan hasil dan tidak akan membingungkan peneliti maka ketika akan turun kelapangan dan itulah yang akan menjadi pedoman yang di pengan oleh peneliti.

c. Teknik Dokumentasi

Menurut Gottschalk dalam Malyadin (2013) pengertian kata dokumen sering kali digunakan para ahli dalam duanpengertian, yang pertama adalah sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, atefak, peninggalan terlukis, dan pertilasan-pertilasan arkeologis.

Dari beberapa pengulasan teknik di atas maka maka dapat ditarik benang merahnya dokumen merupakan sumber data yang digunakan yang dilengkapi, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

F. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah mengacu pada konsep Miles dan Huberman dalam (Said 2011) yaitu *interactive model* yang mengklasifikasikan analisis data menjadi tiga bagian yaitu:

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data), semua data yang diperoleh dilapangan akan ditulis dalam bentuk uraian secara lengkap dan banyak. Kemudian data tersebut direduksi yaitu data dirangkum, membuat kategori, memilih hal-hal yang pokok dan penting yang berkaitan dengan masalah. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dari hasil wawancara dan observasi.
- b. *Data Display* (penyajian Data), setelah melakukan reduksi data, peneliti selanjutnya melakukan tahap ke dua yakni penyajian data dimana data dan informasi yang sudah diperoleh dilapangan dimasukkan ke dalam suatu bentuk tabel.
- c. *Conduision drawing/verification* (menarik kesimpulan/verifikasi) setelah penyajian data, peneliti kemudian menginterpretasi atau menyimpulkan data-data atau informasi yang telah diperoleh dan disajikan. Penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari analisis data untuk menganalisis hal-hal yang masih perlu diketahui mengenai data-data yang telah diperoleh di lapangan, informasi yang perlu dicari dan kesalahan yang harus diperbaiki.

G. Teknik Keabsahan Data

telah dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan kemudian dimintakan kesepakatan dengan sumber data (Fuaidah 2011).

- b) **Tringulasi Teknik**, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebenaran data, bila data yang dihasilkan berbeda, peneliti kemudian melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data. (Fuaidah 2011).
- c) **Tringulasi Waktu**, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan telaah wawancara, observasi atau teknik lain kepada sumber data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Fuaidah 2011).

Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Triangulasi juga membagi teknik yang perlu di perhatikan oleh peneliti agar dapat terstruktur secara sistematis dan peneliti juga harus memperhatikan susunan mulai dari Triangulasi sumber sampai Triangulasi peneliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten di bagian selatan Sulawesi Selatan yang berjarak kurang lebih 10 km dari Ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan, terletak di antara $50^{\circ} 5' - 50^{\circ} 34.7'$ Lintang Selatan (LS) dan $120^{\circ} 33' 19'' - 120^{\circ} 15' 17''$ Bujur Timur (BT), dengan batas-batas administrasi:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kota Makassar dan Kab. Maros
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kab. Takalar dan Kab. Jeneponto
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kota Makassar dan Kab. Takalar
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kab. Sinjai, Kab. Bulukumba dan Kab. Bantaeng

Selanjutnya batas administrasi Kabupaten Gowa dapat dilihat pada peta Administrasi wilayah Kabupaten Gowa sebagai berikut:



Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Sungguminasa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan berpenduduk sebanyak ± 652.941 jiwa, dimana bahasa yang digunakan di kabupaten ini adalah bahasa Makassar dengan suku Konjo Pegunungan yang mendiami hampir seluruh Kabupaten Gowa. Penduduk di kabupaten ini mayoritas beragama Islam. Kabupaten ini berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan dari Jakarta.

Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjar, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 169 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu,

Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km² dan panjang 90 Km.

Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km² yang dapat menyediakan air irigasi seluas + 24.600 Ha, konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m³ dan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan Oktober-November. Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan suhu 27,125°C. Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm,

sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juli - September yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan. (Sumber: Gowa dalam Angka 2018).

B. Strategi Pemerintah Daerah dalam Tata Kelola Perkotaan di Lapangan Syekh Yusuf Kabupaten Gowa

Melalui kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2015-2020 Adnan Puricpta dan Abd. Rauf (Kr.kio) menciptakan beberapa program pembangunan yang dapat meningkatkan kemajuan Kabupaten Gowa dan berdampak juga terhadap masyarakat. Salah satunya mewujudkan Ruang Terbuka Hijau agar masyarakat merasa nyaman dan tenang. Keberadaan Lapangan Syekh Yusuf yang menjadi ikon dan identitas Kabupaten Gowa ini menjadi patokan Pemerintah untuk Revitalisasi yang dimana merupakan suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terbedaya. Berangkat dari penjelasan diatas tersebut maka Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa menemukan terobosan baru mengubah Lapangan Syekh Yusuf menjadi Ruang Terbuka Hijau atau RTH.

Harapan mewujudkan tata kelola urban governance dalam kehidupan pemerintahan dan masyarakat telah lama di upayakan oleh pemerintah daerah sebagai bagian terpenting dari sistem pemerintahan dan mewujudkan pemeritahan yang bersih. Para bupati juga di setiap kabupaten banyak menyatakan ingin mewujudkan tata kelola urban governance. Berbicara tata kelola atau baik pemerintahan sebagai pelaksana aspek politik, ekonomi yang merupakan landasan untuk pembangunanya memiliki kewenangan adimistrasi untuk di kelola pemerintah daerah dalam semua tingkat. Tata kelola adalah peroses keputusan

untuk memformulasikan kebijakan yang dimana yang menjadi sistem implemetasi dari kebijakan pemerintah daerah. Baik pemerintahan berarti kekuasaan yang berdasarkan pada peraturan perundan-undangan yang berlaku dimana semua kebijakan dilakukan secara transparan juga bertanggung jawaban kepada masyarakat, yang dimana harus didasari juga pada aspek kelembagaan bukan atas kehendak ini orang atau kelompok tertentu. (Winandi, 1998).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan disebutkan bahwa pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam UU No. 26 Tahun 2007, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Lapangan Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dibangun dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kualitas lingkungan selain itu menjadi ikon kebanggaan masyarakat serta masyarakat tidak lagi keluar daerah hanya untuk menikmati keindahan RTH diluar dari Kabupaten Gowa. Sejalan dengan itu maka untuk mengukur Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah ini berjalan dengan efektif atau tidak terdapat beberapa indikator yaitu:

a. Memformulasikan Strategi

Tahap memformulasikan strategi antara lain menetapkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi dari sudut pandang eksternal, menetapkan kelemahan dan keunggulan yang dimiliki organisasi dari sudut pandang internal, menyusun rencana jangka panjang, membuat strategi-strategi alternatif dan memilih strategi tertentu yang akan dicapai.

Dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Lapangan Syech Yusuf Pemerintah Daerah membagi beberapa bagian atau Zona. Dimana dalam setiap zona memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pada zona A, merupakan zona yang digunakan ketika upacara. Zona B untuk Lapangan sepak bola dan arena bermain anak. Zona C sebagai Pujasera (Pusat Jajanan Serba Ada) dan Olahraga yang terdiri dari lapangan volly, lapangan basket, lapangan futsal, lapangan takraw dan lapangan skateboard dan Zona D sebagai tempat Monumen Patonro yang terdiri dari tiga lantai.

Zona A merupakan salah satu zona yang sudah diresmikan oleh menteri dalam negeri yaitu Bapak Jenderal Tito, untuk kegunaan secara formal dalam ini keupacaraan yang otomatis menyambung dengan Mesjid Raya Syech Yusuf. Pembangunan RTH Syech Yusuf ini memang dibangun dengan konsep hampir sama dengan Mesjid Agung Syech Yusuf artinya ada konektifitas didalamnya ada unsur saling mengikat. Otomatis di Zona A itu secara strategi memang melekat kepada ada unsur formalitas maupun nonformalitas didalamnya. Kemudian zona B didalamnya terdapat lapangan bola yang atraktif, tempat lalulintas jogging,

tempat lalu lintas lari dengan disisi barat terdapat ruang bermain anak yang ramah lingkungan. Kami tempatkan pasir-pasir putih diantara mereka yang ada keterkerasan misalnya ada paving dan sebagainya. Disitulah Pemerintah mengambil ruang bermain anak ramah terhadap lingkungan. Kemudian posisi parkir dan ruang toilet umum yang terbagi atas toilet pria dan wanita, toilet disable dan ruang tempat menyusui. Jadi kompleksitas itu Pemerintah memang menyiapkan sebagai penunjang RTH sebagai tempat semua umur, semua kategori bisa masuk kedalam lapangan. Sebagai RTH yang tidak mengikat kepada umur bagi orang yang mau menggunakan Lapangan Syech Yusuf.

Zona C meningkatkan kesejahteraan didalamnya karena pedagang kaki lima yang berada di sekitar RTH Syech Yusuf ini, Pemerintah Kabupaten Gowa yaitu Bapak Bupati menarik orang yang sebelumnya sudah berada disekitar lapangan untuk dimasukan kedalam lapangan untuk ikut berjualan didalamnya dan sebelum itu harus didata oleh dinas terkait. Jadi otomatis tidak ada yang tidak terdata apabila ingin terlibat dalam RTH ini, artinya melibatkan semua unsur.

RTH di Lapangan Syech Yusuf sampai saat ini semua terpenuhi seperti kebutuhan olahraga dan sebagainya dimana didalamnya juga ada Menara Patonro yang merupakan didalamnya akan ada galeri perjalanan Kabupaten Gowa kemudian ada unsur pengelola dan sebagainya.

Bentuk mengimplementasikan Strategi yang dicanangkan oleh Pemerintah yaitu kedepan nantinya membentuk Smartvity. Misalnya dalam perjalanan nantinya RTH kedepan akan membangun cctv disetiap titik. Pertama, misalnya 100 titik, dimana 100 titik tersebut akan diberikan cctv serta penguat suara apabila

ada hal-hal yang menyeleweng, sehingga nantinya akan langsung ditegur. Kedua, nantinya akan dilengkapi dengan pengumuman-pengumuman yang sifatnya sebagai titik kumpul dan pengumuman-pengumuman dalam bentuk video besar.

Artinya pengunjung yang sedang menggunakan internet dilapangan Syech Yusuf dapat bebas mendapatkan informasi yang ada ketika pengunjung memasuki area lapangan misalnya Informasi Kabupaten Gowa akan mudah ditemukan. Adapun untuk implementasinya kedepan ini sangat besar kepada anak cucu kita, disamping pengembangan RTH bagian kerjasama akan semakin meningkat karena RTH merupakan pembangunan yang didesain untuk resistensi atau menyerap panas matahari seperti misalnya adanya kolam air yang berfungsi menyerap panas serta adanya pepohonan disekitar lapangan.



Sumber : diambil oleh Penulis
Gambar 4.1 Zona A Lapangan Upacara.

Gambar diatas merupakan Lapangan Upacara di Lapangan Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, dimana Lapangan tersebut terletak di Zona A yang merupakan Zona yang berfungsi sebagai Lapangan Upacara apabila suatu waktu diperlukan.



Sumber : diambil oleh Penulis

Gambar 4.2 Zona B Lapangan Sepak Bola

Gambar diatas merupakan Lapangan Sepak Bola yang terletak disebelah Barat atau terletak disamping Lapangan Upacara.



Sumber : diambil oleh Penulis

Gambar 4.3 Zona C lapangan basket, lapangan futsal, lapangan takraw dan lapangan skateboard.

Gambar diatas merupakan beberapa tempat atau lapangan Olahraga yang terletak di Lapangan Syekh Yusuf. Semua Lapangan diatas berada pada Zona C dimana Zona C merupakan tempat berolahraga seperti Basket, Futsal, Takraw dan Skateboard.



Sumber : diambil oleh Penulis

Gambar 4.4 Zona D Monumen Patonro yang terdiri dari tiga lantai
Berikut hasil wawancara dengan salah satu Staf Dinas Tata Ruang (Seksi
Bangunan Gedung) yang mengatakan bahwa :

“Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Lapangan Syech Yusuf Pemerintah Daerah membagi beberapa bagian atau Zona agar supaya dalam satu area (lapangan) yang luasnya 5,6 hektar dilakukan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi ketika berkunjung ke Lapangan Syech Yusuf, untuk semetara ini belum dilakukan peresmian pembangunan di lapangan syech yusuf oleh karena itu yang menjadi penanggungjawab semetara yaitu Dinas Tata Ruang. Setelah peresmian dilakukan maka yang menjadi penanggungjawab nantinya yaitu Kepala UPTD Lapangan Syech Yusuf Kabupaten Gowa”. Hasil Wawancara dengan Subchan Ishak, 5 Oktober 2020.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Lapangan Syech Yusuf Pemerintah Daerah membagi

beberapa bagian atau Zona agar supaya dalam satu area (lapangan) yang luasnya 5,6 hektar dilakukan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi ketika berkunjung ke Lapangan Syech Yusuf, untuk sementara ini belum dilakukan peresmian pembangunan di lapangan syech yusuf oleh karena itu yang menjadi penanggungjawab sementara yaitu Dinas Tata Ruang. Setelah peresmian dilakukan maka yang menjadi penanggungjawab selanjutnya yaitu Kepala UPTD Lapangan Syech Yusuf Kabupaten Gowa.

Hasil wawancara diatas didukung dengan pernyataan Staf Dinas Tata Ruang (Seksi Pemanfaatan Ruang) yang menyatakan bahwa :

“Proses Pembangunan dalam penataan Ruang Terbuka Hijau dengan Strategi Pemerintah Daerah di Lapangan Syech Yusuf dalam hal ini Dinas Tata Ruang sejauh ini berjalan dengan baik. Pembangunan mulai dilakukan pada Tahun 2018 sampai Tahun 2019, pembangunan dilakukan dengan dua Tahap dan berjalan dengan baik. Hasil wawancara dengan Fatmawati, 5 Oktober 2020.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Proses Pembangunan dalam penataan Ruang Terbuka Hijau dengan Strategi Pemerintah Daerah di Lapangan Syech Yusuf dalam hal ini Dinas Tata Ruang sejauh ini berjalan dengan baik. Pembangunan mulai dilakukan pada Tahun 2018 sampai Tahun 2019, pembangunan dilakukan dengan dua Tahap dan berjalan dengan baik.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu Staff Dinas Tata Ruang (Seksi Bangunan Gedung) yang mengatakan bahwa :

“Secara khusus RTH ini merupakan program prioritas Kabupaten Gowa dimana Strategis itu merupakan acuan Visi Misi Kabupaten Gowa untuk kedepan yang lebih bersejahtera dan lebih baik. Adapun pembagian zona strategi itu otomatis untuk pencapaian prioritas-prioritas pemenuhan yang dimana akan meningkatkan kehidupan masyarakat kabupaten gowa meningkatkan kesejahteraan. Dimana

pembagian zona itu terdapat pembagian untuk berolahraga, ada unsur kepemudaan, unsur anak-anak dan lansia sudah diatur dalam RTH yang dimaksud". Hasil wawancara dengan Subchan Ishak, 17 Februari 2021

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Secara khusus RTH itu merupakan program prioritas Kabupaten Gowa dimana Strategis itu merupakan acuan Visi Misi Kabupaten Gowa untuk kedepan yang lebih bersejahtera dan lebih baik. Adapun pembagian zona strategi itu otomatis untuk pencapaian prioritas-prioritas pemenuhan yang dimana akan meningkatkan kehidupan masyarakat Kabupaten Gowa meningkatkan kesejahteraan. Dimana pembagian zona itu terdapat pembagian untuk berolahraga, ada unsur kepemudaan, unsur anak-anak dan lansia sudah diatur dalam RTH.

Strategi ini sudah sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Gowa Tidak ada hal-hal yang menyangkut bahwa ini diluar dari peraturan. Karena berhubung bapak Bupati selaku Pemerintah juga menyanangkan RTH ini memang satu-satunya RTH di Provinsi Sulsel yang betul-betul atraktif yang semua unsur ada didalamnya.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu Staf Dinas Tata Ruang (Seksi Perencanaan Ruang) yang menyatakan bahwa :

“Tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Lapangan Syech Yusuf sampai sejauh ini belum ada, akan tetapi para pengunjung nantinya akan di himbau agar selalu menjaga keamanan dan kebersihan demi kenyamanan bersama”. Hasil wawancara dengan Abd. Azis, 5 Oktober 2020.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Tata Ruang selama pembangunan sampai sejauh ini belum ada, akan tetapi untuk para pengunjung

nantinya dihibmrau agar tetap selalu menjaga keamanan dan kebersihan demi kenyamanan bersama.

b. Mengimplementasikan Strategi

Tahap mengimplementasikan strategi memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi pegawai, dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sehingga strategi yang sudah diformulasikan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilisasi sistem informasi serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi. Mengimplementasikan strategi sering disebut sebagai "action stage" dari manajemen strategis. Pengimplementasian strategi memiliki maksud memobilisasi para pegawai dan manajer untuk menterjemahkan strategi yang sudah diformulasikan menjadi aksi.

Strategi Penataan Ruang Terbuka Hijau di Lapangan Syech Yusuf dilakukan dengan pembagian zona karena memiliki fungsi dan peran masing-masing tiap zona. Mulai dari zona formal hingga non formal, pembagian zona ini memiliki sifat rekreasi dan olahraga jadi kesannya semua ada didalam satu area ini dan setiap zona saling terkait karena memiliki konsep pendukung yang terkait satu sama lain.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu Staf Dinas Tata Ruang (Seksi Bangunan Gedung) yang mengatakan bahwa :

“ Dinas-dinas yang terkait dalam setiap zona yaitu kepala UPTD Lapangan Syech Yusuf. Nantinya ada kepala unit pengelola teknis daerah yang langsung menangani Lapangan Syech Yusuf dibawah naungan DISPORA, sehingga nantinya ada memang kepala penanggung jawab yang nantinya dipilih oleh Bupati untuk menangani RTH baik dari keamanannya, kebersihannya dan pemeliharaan sarana dan prasarananya”. Hasil Wawancara dengan Subchan Ishak, 5 Oktober 2020.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas-dinas yang terkait dalam setiap zona yaitu kepala UPTD Lapangan Syech Yusuf. Nantinya ada kepala unit pengelola teknis daerah yang langsung menangani Lapangan Syech Yusuf dibawah naungan DISPORA, sehingga nantinya ada memang kepala penanggung jawab yang nantinya dipilih oleh Bupati untuk menangani RTH baik dari keamanannya, kebersihannya dan pemeliharaan sarana dan prasarananya.

Hasil wawancara diatas didukung dengan pernyataan Staf Dinas Tata Ruang (Seksi Pemanfaatan Ruang) yang menyatakan bahwa :

“Kepala UPTD bertanggungjawab didalam pembangunan RTH di Lapangan Syech Yusuf karena pembangunan tidak gampang jika tidak ada yang kelola RTH ini. Apapun yang masuk seperti misalnya pemain bola, takraw dan volley ataupun gerobak penjual makanan yang masuk ke lapangan harus diketahui, membuatkan jadwal-jadwal yang akan main (bola) pada hari ini misalnya. Oleh karena itu dengan adanya UPTD yang mengurus itu semua”. Hasil wawancara dengan Fatmawati, 5 Oktober 2020.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala UPTD bertanggungjawab didalam pembangunan RTH di Lapangan Syech Yusuf karena pembangunan tidak gampang jika tidak ada yang kelola RTH ini. Apapun yang masuk seperti misalnya pemain bola, takraw dan volley ataupun gerobak penjual makanan yang masuk ke lapangan harus diketahui, membuatkan jadwal-jadwal

yang akan main (bola) pada hari ini misalnya. Oleh karena itu dengan adanya UPTD yang mengurus itu semua.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu Staf Dinas Tata Ruang (Seksi Bangunan Gedung) yang mengatakan bahwa :

“Mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sehingga strategi yang sudah diformulasikan dan dapat dilaksanakan sudah sesuai. Dalam hal ini didalamnya sudah terbentuk UPTD dimana didalamnya sudah ada bagian pemeliharaan rumput, bagian pembersihan, kemudian bagian keamanan. Jadi sumber daya-sumber daya itu yang melekat dan sudah berjalan dalam satu tahun ini, jadi otomatis pemberdayaan masyarakat juga ada atau tenaga lokal yang digunakan”. Hasil wawancara dengan Subchan Ishak, 17 Februari 2021

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pengalokasian sumber daya yang dimiliki sehingga strategi yang sudah diformulasikan dan dapat dilaksanakan sudah sesuai. Dalam hal ini didalamnya sudah terbentuk UPTD dimana didalamnya sudah ada bagian pemeliharaan rumput, bagian pembersihan, kemudian bagian keamanan. Jadi sumber daya-sumber daya itu yang melekat dan sudah berjalan dalam satu tahun ini, jadi otomatis pemberdayaan masyarakat juga ada atau tenaga lokal yang digunakan.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu Staf Dinas Tata Ruang (Seksi Perencanaan Ruang) yang menyatakan bahwa :

“Berbicara tentang Program Tahunan, otomatis pasti kita berbicara tentang event. Yang melakukan pengaturan event itu adalah bagian kerjasama dalam hal ini Sekertariat Daerah dan beberapa penanggungjawab lainnya. Merekalah yang menjadwalkan program tahunan. Selain itu UPTD juga bertugas untuk mengatur atau menjadwalkan setiap kegiatan atau event yang akan dilaksanakan di Lapangan Syech Yusuf”. Hasil wawancara dengan Abd. Azis, . 17 Februari 2021

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Program Tahunan, dalam hal di RTH Lapangan Syech Yusuf otomatis pasti berbicara tentang event dimana event merupakan Program Tahunan yang akan dilakukan. Adapun yang melakukan pengaturan event itu adalah bagian Kerjasama dalam hal ini Sekertariat Daerah dan beberapa penanggungjawab lainnya. Merekalah yang menjadwalkan program tahunan. Selain itu UPTD juga bertugas untuk memberikan informasi implementasi dan mengatur atau menjadwalkan setiap kegiatan atau event yang akan dilaksanakan di Lapangan Syech Yusuf agar tidak terjadi pertabrakan jadwal menyangkut itu semua ada pada bagian kerjasama sekretaris daerah kemudian ada juga UPTD dari DISPORA.

c. Mengevaluasi Strategi

Mengevaluasi Strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategis. Para manajer sangat perlu untuk mengetahui ketika ada strategi yang sudah diformulasikan tidak berjalan dengan baik. Evaluasi strategi memiliki tiga aktifitas yang fundamental, yaitu mereview faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar untuk strategi saat ini, mengukur performa dan mengambil langkah korektif.

Pembagian zona di Lapangan Syech Yusuf merupakan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dimana setiap zona memiliki fungsi masing-masing. Masyarakat sekitar Lapangan Syech Yusuf sampai dengan saat ini sangat menerima dengan adanya RTH ini. Akan tetapi untuk tanggapan masyarakat yang lebih signifikan untuk saat ini belum ada karena RTH di Lapangan Syech Yusuf belum diresmikan oleh Pemerintah yang bersangkutan akan tetapi saat ini

Pemerintah sementara mencari waktu yang tepat untuk segera meresmikan RTH di Lapangan Syech Yusuf.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu staf Dinas Tata Ruang (Seksi Pemanfaatan Ruang) yang menyatakan bahwa :

“Sejauh ini pembangunan RTH di Lapangan syech yusuf sampai sekarang ini masyarakat sekitar sangat menerima dengan baik. Karena dengan adanya RTH ini kualitas hidup Kabupaten Gowa atau kualitas lingkungan masyarakat Kabupaten Gowa. Selain itu RTH di Lapangan syech yusuf juga merupakan suatu ikon kebanggaan masyarakat yang ada di Kabupaten Gowa.” *Hasil wawancara dengan Fatmawati, 5 Oktober 2020.*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Sejauh ini pembangunan RTH di Lapangan syech yusuf sampai sekarang ini masyarakat sekitar sangat menerima dengan baik. Karena dengan adanya RTH ini kualitas hidup Kabupaten Gowa atau kualitas lingkungan masyarakat Kabupaten Gowa. Selain itu RTH di Lapangan syech yusuf juga merupakan suatu ikon kebanggaan masyarakat yang ada di Kabupaten Gowa.

Hasil wawancara diatas didukung dengan pernyataan salah satu Staf Dinas Tata Ruang (Seksi Bangunan Gedung) yang mengatakan bahwa :

“Adanya RTH di Lapangan syech yusuf dapat menjadi sarana masyarakat kabupaten gowa untuk berwisata ataupun berolahraga sehingga masyarakat tidak lagi keluar daerah jika hanya untuk berohlaraga ataupun menikmati waktu dengan keluarga. Sejauh ini pembangunan sudah hampir rampung, kami hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melakukan peresmian agar supaya RTH di Lapangan Syech Yusuf bisa dinikmati oleh semua masyarakat Kabupaten Gowa maupun dari daerah lain. *Hasil Wawancara dengan Subchan Ishak, 5 Oktober 2020.*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Adanya RTH di Lapangan syech yusuf dapat menjadi sarana masyarakat kabupaten gowa untuk

berwisata ataupun berolahraga sehingga masyarakat tidak lagi keluar daerah jika hanya untuk berolahraga ataupun menikmati waktu dengan keluarga. Sejauh ini pembangunan sudah hampir rampung, kami hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melakukan peresmian agar supaya RTH di Lapangan Syech Yusuf bisa dinikmati oleh semua masyarakat Kabupaten Gowa maupun dari daerah lain.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu Staf Dinas Tata Ruang (Seksi Bangunan Gedung) yang mengatakan bahwa

“Untuk mengukur atau mereview faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar untuk strategi saat ini, mengukur performa dan mengambil langkah korektif. Berhubung karena masa pandemi otomatis ini RTH belum dibuka secara resmi oleh Bupati, jadi untuk mereview apa yang menjadi sebenarnya kekurangan apalagi tambahan itu harus dari masyarakat karena masyarakat yang rasakan. Begituhalnya dengan feedback masyarakat harus merasakan apa yang harusnya masih ingin ditambah. Akantetapi apabila masyarakat sudah bisa menikmati otomatis mereka bisa memberikan masukan kepada pengelola. Tapi secara komulatif atau secara spontanitas dari masyarakat sangat bangga terhadap RTH Syech Yusuf. Keinginan masyarakat untuk dapat menikmati RTH di Lapangan Syech Yusuf sangat besar akan tetapi dikarenakan adanya PSBB beberapa waktu lalu maka dari pihak pengelola maupun pemerintah belum bisa melakukan atau mereview feedback dari masyarakat”. Hasil wawancara dengan Subchan Ishak, 17 Februari 2021

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Berhubung karena masa pandemi otomatis untuk mengukur atau mereview faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar untuk strategi saat ini, mengukur performa dan mengambil langkah korektif ini, RTH belum dibuka secara resmi oleh bupati, jadi untuk mereview apa yang menjadi sebenarnya kekurangan apalagi tambahan itu harus dari masyarakat karena masyarakat yang rasakan. Begituhalnya dengan feedback masyarakat harus merasakan apa yang harusnya masih ingin ditambah. Akantetapi apabila masyarakat sudah bisa menikmati otomatis mereka bisa

memberikan masukan kepada pengelola. Tapi secara kumulatif atau secara spontanitas dari masyarakat sangat bangga terhadap RTH Syech Yusuf. Keinginan masyarakat untuk dapat menikmati RTH di Lapangan Syech Yusuf sangat besar akan tetapi dikarenakan adanya PSBB beberapa waktu lalu maka dari pihak pengelola maupun pemerintah belum bisa melakukan atau mereview feedback dari masyarakat.

C. Hasil Penemuan Penelitian Strategi Pemerintah Daerah dalam Tatakelola Perkotaan di Lapangan Syech Yusuf Kecamatan Somba Opu

Dari hasil penemuan penelitian adalah Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Lapangan Syech Yusuf Pemerintah Daerah membagi beberapa bagian atau Zona agar supaya dalam satu area (lapangan) yang luasnya 5,6 hektar dilakukan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi ketika berkunjung ke Lapangan Syech Yusuf, untuk sementara ini belum dilakukan peresmian pembangunan di lapangan syech yusuf oleh karena itu yang menjadi penanggungjawab sementara yaitu Dinas Tata Ruang. Setelah peresmian dilakukan maka yang menjadi penanggungjawab selanjutnya yaitu Kepala UPTD Lapangan Syech Yusuf Kabupaten Gowa. Proses Pembangunan dalam penataan Ruang Terbuka Hijau dengan Strategi Pemerintah Daerah di Lapangan Syech Yusuf dalam hal ini Dinas Tata Ruang sejauh ini berjalan dengan baik. Pembangunan mulai dilakukan pada Tahun 2018 sampai Tahun 2019.

Secara khusus RTH itu merupakan program prioritas Kabupaten Gowa dimana Strategis itu merupakan acuan Visi Misi Kabupaten Gowa untuk kedepan yang lebih bersejahtera dan lebih baik. Adapun pembagian zona strategi itu,

otomatis untuk pencapaian prioritas-prioritas pemenuhan yang dimana akan meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gowa.

Dimana zona itu terdapat pembagian yaitu untuk berolahraga, ada unsur kepemudaan, unsur anak-anak dan lansia sudah diatur dalam RTH yang dimaksud. Zona A merupakan salah satu zona yang sudah diresmikan oleh menteri dalam negeri yaitu Bapak Jenderal Tito, yaitu untuk kegunaan secara formal dalam arti keupacaraan yang otomatis menyambung dengan mesjid raya syech yusuf. Pembangunan RTH Syech Yusuf ini memang dibangun dengan konsep hampir sama dengan Mesjid Agung Syech Yusuf artinya ada konektifitas didalamnya ada unsur saling mengikat. Otomatis di Zona A itu secara strategi memang melekat kepada ada unsur formalitas maupun nonformalitas didalamnya. Kemudian zona B didalamnya terdapat lapangan bola yang atraktif, tempat lalulintas jogging, tempat lalulintas lari dengan disisi barat terdapat ruang bermain anak yang ramah lingkungan. Pengelola menempatkan pasir-pasir putih diantara halaman yang ada keterkerasan misalnya ada paving dan sebagainya, disitulah ruang bermain anak yang ramah terhadap lingkungan. Kemudian posisi parkir dan ruang toilet umum yang terbagi atas toilet pria dan wanita, toilet disable dan ruang tempat menyusui. Jadi kompleksitas itu kami memang menyiapkan sebagai penunjang RTH sebagai tempat semua umur dan semua kategori. Agar supaya semua bisa masuk kedalam lapangan dan tidak mengikat kepada umur bagi orang yang mau menggunakan.

Zona C meningkatkan kesejahteraan didalamnya karena pedagang kaki lima yang berada di sekitar RTH di Lapangan Syech Yusuf ini, Pemerintah Kabupaten

Gowa yaitu Bapak Bupati menarik orang yang sebelumnya sudah berada disekitar lapangan untuk dimasukan kedalam lapangan untuk ikut berjualan didalamnya dan sebelum itu harus didata oleh dinas terkait. Jadi otomatis tidak ada yang tidak terdata apabila ingin terlibat dalam RTH ini, artinya melibatkan semua unsur. Kemudian di dalam perjalanannya pedagang kaki lima ini akan meningkatkan usaha-usaha didalamnya. Apakah usaha tempat minum atau makanan dan yang lainnya kemudian diatur oleh UPTD terkait yang oleh DISPORA membentuk UPTD RTH Syech Yusuf. Jadi pengelolaannya ini nantinya dinaungi UPTD, dimana UPTD ini dinaungi Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau DISPORA.

Terpenting adalah konsep strategi pembangunan terhadap RTH ini merupakan hanya satu-satunya di Sulawesi Selatan yang sudah mencakup semua titik yang menjadi linemark dimana dalam hal ini ada satu sisi RTH Syech Yusuf semua terpenuhi, mulai dari kebutuhan olahraga dan sebagainya. Serta didalamnya juga ada Menara Patonro yang didalamnya akan ada galeri perjalanan Kabupaten Gowa, kemudian ada unsur pengelola dan sebagainya. Strategi ini sudah sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Gowa. Tidak ada hal-hal yang menyangkut bahwa ini diluar dari peraturan. Berhubung bapak Bupati mencanangkan RTH ini memang satu-satunya RTH di Provinsi Sulsel yang betul-betul atraktif yang semua unsur ada didalamnya.

Berhubung karena masa pandemi otomatis untuk mengukur atau mereview faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar untuk strategi saat ini, mengukur performa dan mengambil langkah korektif ini, RTH belum dibuka secara resmi oleh Bupati. Jadi untuk mereview apa yang menjadi sebenarnya

kekurangan apalagi tambahan itu harus dari masyarakat karena masyarakat yang merasakan. Begitulahnya dengan feedback masyarakat harus merasakan apa yang harusnya masih ingin ditambah. Akan tetapi apabila masyarakat sudah bisa menikmati otomatis mereka bisa memberikan masukan kepada pengelola. Tapi secara kumulatif atau secara spontanitas dari masyarakat sangat bangga terhadap RTH Syech Yusuf. Keinginan masyarakat untuk dapat menikmati RTH di Lapangan Syech Yusuf sangat besar akan tetapi dikarenakan adanya PSBB beberapa waktu lalu maka dari pihak pengelola maupun pemerintah belum bisa melakukan atau mereview feedback dari masyarakat.

Pengalokasian sumber daya yang dimiliki sehingga strategi yang sudah diformulasikan dan dapat dilaksanakan sudah sesuai. Dalam hal ini didalamnya sudah terbentuk UPTD dimana didalamnya sudah ada bagian pemeliharaan rumput, bagian pembersihan, kemudian bagian keamanan. Jadi sumber daya-sumber daya itu yang melekat dan sudah berjalan dalam satu tahun ini, jadi otomatis pemberdayaan masyarakat juga ada atau tenaga lokal yang digunakan.

Program Tahunan, dalam hal di RTH Lapangan Syech Yusuf otomatis pasti berbicara tentang event dimana event merupakan Program Tahunan yang akan dilakukan. Adapun yang melakukan pengaturan event itu adalah bagian Kerjasama dalam hal ini Sekertariat Daerah dan beberapa penanggungjawab lainnya. Merekalah yang menjadwalkan program tahunan. Selain itu UPTD juga bertugas untuk memberikan informasi implementasi dan mengatur atau menjadwalkan setiap kegiatan atau event yang akan dilaksanakan di Lapangan Syech Yusuf agar tidak terjadi pertabrakan jadwal menyangkut itu semua ada

pada bagian kerjasama sekretaris daerah kemudian ada juga UPTD dari DISPORA.

Bentuk mengimplementasikan Strategi yang dicanangkan oleh Pemerintah yaitu kedepan nantinya membentuk Smartvity. Misalnya dalam perjalanan nantinya RTH kedepan akan membangun cctv disetiap titik. Pertama, misalnya 100 titik, dimana 100 titik tersebut akan diberikan cctv serta pengeras suara apabila ada hal-hal yang menyeleweng, sehingga nantinya akan langsung ditegur. Kedua, nantinya akan dilengkapi dengan pengumuman-pengumuman yang sifatnya sebagai titik kumpul dan pengumuman-pengumuman dalam bentuk video besar.

Artinya pengunjung yang sedang menggunakan internet dilapangan Syech Yusuf dapat bebas mendapatkan informasi yang ada ketika pengunjung memasuki area lapangan misalnya informasi Kabupaten Gowa akan mudah ditemukan. Adapun untuk implementasinya kedepan ini sangat besar kepada anak cucu kita, disamping pengembangan RTH bagian kerjasama akan semakin meningkat karena RTH merupakan pembangunan yang didesain untuk resistensi atau menyerap panas matahari seperti misalnya adanya kolam air yang berfungsi menyerap panas serta adanya pepohonan disekitar lapangan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penulis terkait Penelitian Strategi Pemerintah Daerah dalam Tatakelola Perkotaan di Lapangan Syekh Yusuf Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Memformulasikan Strategi

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Lapangan Syekh Yusuf Pemerintah Daerah membagi beberapa bagian atau Zona. Dimana dalam setiap zona memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pada zona A, merupakan zona yang digunakan ketika Upacara, Zona B untuk Lapangan sepak bola dan arena bermain anak. Zona C sebagai Pujasera (Pusat Jajanan Serba Ada) dan Olahraga yang terdiri dari lapangan volly, lapangan basket, lapangan futsal, lapangan takraw dan lapangan skateboard dan Zona D sebagai tempat Monumen Patonro yang terdiri dari tiga lantai.

2. Mengimplementasikan Strategi

Strategi Penataan Ruang Terbuka Hijau di Lapangan Syekh Yusuf dilakukan dengan pembagian zona karena memiliki fungsi dan peran masing-masing tiap zona. Mulai dari zona formal hingga non formal, pembagian zona ini memiliki sifat rekreasi dan olahraga jadi kesannya semua ada didalam satu area ini dan setiap zona saling terkait karena memiliki konsep pendukung yang terkait satu sama lain.

3. Mengevaluasi Strategi

Adanya RTH di Lapangan syech yusuf dapat menjadi sarana masyarakat kabupaten gowa untuk berwisata ataupun berolahraga sehingga masyarakat tidak lagi keluar daerah jika hanya untuk berolahraga ataupun menikmati waktu dengan keluarga. Sejauh ini pembangunan sudah hampir rampung, kami hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melakukan peresmian agar supaya RTH di Lapangan Syech Yusuf bisa dinikmati oleh semua masyarakat Kabupaten Gowa maupun dari daerah lain

B. SARAN

1. Pemerintah sebaiknya lebih mengusahakan lagi agar supaya secepatnya RTH di Lapangan Syech Yusuf agar segera dapat dinikmati
2. Keamanan dan kenyamanan sebaiknya menjadi prioritas Pemerintah yang menjadi penanggungjawab di RTH Lapangan Syech Yusuf Kabupaten Gowa.

DAFTAR PUSTAKA

- (AG, 2012). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- (Moleong, 2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- (Budiardjo, 2010). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta :Gramedia Pustaka Utama.
- (Budi, 2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*.Yogyakarta: CAPS.
- (Nik Ahmad, 2017). *Prinsip Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Indeks.
- (Triono, 2012). *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara*. Jakarta: Irtikas.
- (Dunn, 2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- (Fuidah, 2011). *Metode Penelitian Tringulasi*. Yogyakarta: Pusat Belajar.
- (Makmur, 2019). *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolalaang Mongondow Utara*. Jurnal Manajemen/ Volume XX, No.02, Juni 2016.
- (Malyadin, 2013). *Pengertian Dokumen & Dokumentasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- (Meleong, 2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- (Nanga, 2005). *Makro Ekonomi Teori Masalah dan Kebijakan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- (Onong Uchjana, 2005). *Ilmu Komunikasi, Teori, dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- (Sahid, 2011). *Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles dan Huberman*. Surakarta: UMS
- (Sugiyono, 2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- (Sukirno, 2013). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- (Suyanto, 2009). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Perdana Media.
- (David, 2010). *Manajemen Strategi*. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/> Diakses pada tanggal 1 Januari 2021.
- (Allison, 2013). *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolalaang Mongondow Utara*. Jurnal Manajemen/ Volume XX, No.02, Juni 2016.
- (Hoessein, 2007). *Konsep Pemerintah Daerah*. <http://repository.ut.ac.id/> Diakses pada tanggal 10 Januari 2021.

(David, 2006). *Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Status Desa Menuju Desa Mandiri*. Skripsi tidak diterbitkan. Bandar Lampung: Universitas Lampung





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Jl. Tumanurung No. 4 Telp. (0411)889055 Sungguminasa

LEMBARAN DISPOSISI

Surat dari : PTSP PROV. SULSEL	Diterima Tanggal : 14 ~ 07 ~ 2020
Tgl. Surat : 10 JULI 2020	Nomor : 230
No. Surat : 3490/S-01/PTSP/2020	Unit Pengelola : Sek. Bappeda

ISI DISPOSISI :

1. Untuk diketahui
2. Untuk ditindaklanjuti
3. Untuk diwakili
4. Untuk diatur/diwakilkkan
5. Untuk diarsipkan
6. Untuk dipersiapkan
7. Untuk dikaji/mohon saran
8. Untuk dikoordinasikan
9. Untuk diingatkan
10.

1. Sekretaris
2. Kabid Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayhan
3. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
4. Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Wd. Ka. Bappeda

Indras Perungul

N. 4/2020
07

Dibaca dan liston

Pengarah, *N. 20/07/2020*

[Signature]
14/07/2020



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
SEKRETARIAT DAERAH

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : PTSP	Diterima dari : 97 / Tum / VII / 2016
Tgl Surat : 10 Juli 2020	Tanggal : 14 / 07 / 2020
No. Surat : 3950/S-01/PTSP/2020	Nomor : 070 / 17 / 2020
	Unit Pengolah : <i>Seede</i>

Sifat : Segera/Urgent Perlu Perhatian Khusus Perhatikan Batas Waktu

Kepada Yth. Bupati Wakil Bupati

Mohon Petunjuk

Ditugaskan Kepada :

<input type="checkbox"/> Wakil Bupati	<input checked="" type="checkbox"/> Kepala <i>Ramadhan</i>
<input type="checkbox"/> Sekretaris Daerah	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kandis</i> <i>RI-12</i>
<input type="checkbox"/> Asisten I, II, III dan Staf Ahli	<input type="checkbox"/>

Dengan hormat, harap untuk :

<input type="checkbox"/> Perhatian	<input type="checkbox"/> Belum dapat disetujui
<input type="checkbox"/> Dijadwalkan	<input type="checkbox"/> Dikoordinasikan
<input type="checkbox"/> Diagendakan	<input type="checkbox"/> Prinsip setuju dan proses sesuai ketentuan
<input type="checkbox"/> Mewakili	<input type="checkbox"/> Mohon saran
<input type="checkbox"/> Diwakilkan	<input type="checkbox"/> Dikaji
<input type="checkbox"/> Ditindak lanjuti	<input type="checkbox"/> Diketahui
<input type="checkbox"/> ACC. Proses sesuai ketentuan	<input type="checkbox"/> Bahan Seperlunya
	<input type="checkbox"/> Sebagai bahan referensi

14/7-2020

Catatan :

✓ Dapa Hamba data / informasi terdapat di ripan
✓ abs sesuai ybs

Pengarah,



12020193003625

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 3490/S.01/PTSP/2020
Tempat :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 696/05/C.4-VIII/VII/41/2020 tanggal 02 Juli 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : IRFANDI M
Nomor Pokok : 105641102616
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

dimaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM TATA KELOLA URBAN GOVERNANCE DI LAPANGAN SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 10 Juli s/d 04 September 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 10 Juli 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. JIFFAH RAFIDA DJAFAR, ST., MT.
Nip : 19741021-200903 2 001

Keputusan Yth
Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
Peringatan

RIWAYAT HIDUP



IRFANDI. M. Dilahirkan di Benteng Rajaya Pada Tanggal 20 April 1997. Anak Pertama dari Pasangan Mustakim Ms dan Mawar C. Pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres Po'rong Pada Tahun 2010. Pada Tahun Yang Sama Penulis Melanjutkan Pendidikan di MTs Wihdatul Ulum, dan Tamat Pada Tahun 2013. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Manuju, Pada Tahun 2016 Penulis mengambil Jurusan ilmu pemerinthan dan Selesai Pada Tahun 2021. Pada Tahun 2016 Penulis Melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, Tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Penulis Menyelesaikan Kuliah Strata Satu (S1) Pada Tahun 2021. Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai doa dari kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan Skripsi yang berjudul **"Strategi Pemerintah Daerah dalam Tata Kelola Perkotaan di Lapangan Syech Yusuf Kelurahan Somba Opu Kabupaten Gowa"**.